



Analisis Perubahan Nama Gereja Dayak Evangelis Menjadi Gereja Kalimantan Evangelis: Studi Histografi

Hadi Saputra

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis

Email: hadisaputra@stt-gke.ac.id

Abstract

So far, the writing of the history of the Kalimantan Evangelical Church (GKE) has always been associated with the efforts of the Dayak Evangelical Church (GDE) to become GKE, only seeing it from the angle of ecumenical spirit, even though there is something very important, namely removing the colonial roots behind the word Dayak. In the struggle for independence that existed at that time, the word GDE was identified with the role of the Dayak people who were considered to support the Dutch Colonial government. Historical research is classified under the "Historical Method", which is a research method specifically used in historical research. The removal of the name Dayak from the GDE was an attempt by the church to wash itself of the burden of past history, which identified Dayak and Colonial power. This paper sees that the church was also visibly involved with the issues that existed at that time, then the church also tried to transform so that the ideals of the church's struggle were no longer just tribal interests but also became a nationalist church.

Keywords: *kalimantan evangelical church; dayak evangelical church; dayak; ecumenical*

Abstrak

Sejauh ini penulisan sejarah Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) selalu mengaitkan dengan upaya Gereja Dayak Evangelis (GDE) menjadi GKE hanya melihatnya dari sudut semangat oikumene, padahal ada sesuatu yang sangat penting yaitu menghilangkan akar Kolonial dibalik kata Dayak yang tersemat. Dalam pergulatan kemerdekaan yang ada pada saat itu kata GDE di identikan dengan peran orang-orang Dayak yang dianggap mendukung pemerintah Kolonial Belanda. Penelitian sejarah digolongkan dalam "Metode Historis", yaitu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah. Penghilangan nama Dayak dari adalah sebuah upaya gereja mencuci diri dari beban sejarah masa lalu, yang mengidentikan Dayak dan kekuatan Kolonial. Tulisan ini melihat bahwa gereja juga terlibat secara nyata dengan isu yang ada pada saat itu, kemudian gereja juga mencoba bertransformasi agar cita-cita perjuangan gereja bukan lagi hanya sekedar kepentingan kesukuan tetapi juga menjadi gereja yang nasionalis.

Kata Kunci: gereja kalimantan evangelis; gereja dayak evangelis; dayak; oikumene

Pendahuluan

Sebagai gereja protestan tertua di Kalimantan, Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) menempuh jalan panjang sejak kedatangan misionaris *Rheinische Missionsgesellschaft* (RMG) dari Jerman. Misionaris Barnstein 1835, tiba dari Wuppertal Jerman di Kalimantan, maka sejak itulah proses misi potestan pertama diperkenalkan. Baptisan pertama terhadap perempuan Dayak dilakukan oleh Barnstein di Banjarmasin, pada tahun 1837. Sebagai simbol bahwa bibit Kekristenan tersebut mulai ditabur mulai ditanam bumi Kalimantan (Barnstein, 1837). Pemberitaan injil kepada masyarakat Dayak di Kalimantan dilakukan dengan standar yang sulit, untuk menjadi Kristen bukan hanya ingin dibaptis tetapi juga melewati rangkaian pendidikan persiapan yang panjang, dengan harapan menghasilkan Kristen yang berkualitas.

Selanjutnya RMG mengirimkan misionarisnya, dalam mengkristenkan orang-orang Dayak pada abad ke 19 dan menebus para budak hutang (*Pandeling*). Kelompok Kristen Dayak membentuk sebuah masyarakat yang membangkang terhadap kekuatan kolonial lokal, yaitu Kesultanan Banjar. Puncaknya pada 1859 dimana revolusi Pangeran Hidayat dikobarkan, sebuah gerakan bersenjata yang menganggap bahwa Belanda ikut campur dalam masalah internal Kesultanan Banjar (Kriele 1915). Pada revolusi Hidayat pemerintah Hindia Belanda menjadi sasaran kebencian dan pembantaian, begitu juga para misionaris RMG yang dianggap ikut melakukan provokasi kepada orang Dayak, untuk menolak tunduk melawan pangaruh pada supremasi Banjar. Revolusi Hidayat dapat diredam, walaupun dampaknya kepada pengijilan dengan gugurnya tujuh orang Misionaris. Perang Dunia I memiliki dampak negara Jerman mengalami krisis keuangan, dan RMG di Kalimantan harus ditutup dengan mengalihkan semua aset dan tanggung jawab di Kalimantan. Pihak yang di percayakan adalah Basler Mission (BM), dimana sejak 1922 misionaris Jerman berangsur-angsur digantikan oleh misionaris Swiss.

Sebagian besar tulisan mengenai perubahan nama GDE menjadi GKE, dikaitkan dengan semangat oikumene seperti yang disampaikan oleh Ukur. Tulisan yang sama mengenai perubahan nama tersebut dibuat oleh Frenedi, yang menghubungkannya dengan konsep Pancasila "*Bhineka Tunggal Ika*", yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga sehingga penghilangan kata Dayak sangat relevan (Frenedi 2000). Werhan Asmin melihat bahwa perubahan nama GDE menjadi GKE, dari sudut pandang hukum. Perubahan nama tersebut tidak merubah status, bahwa secara hukum GDE tetap organisasi yang diakui secara sah lewat keputusan pemerintah Hindia Belanda, jadi bukan GKE (Asmin 2004). Pandangan berbeda diungkapkan oleh Marko Mahin dan Rama Tulus, yang mengatakan bahwa perubahan nama GDE menjadi GKE adalah sesuatu yang "banci". Dalam artian sia-sia dimana GKE berharap menjadi gereja untuk semua suku, tetapi suku-suku non Dayak tetap setia pada gereja suku mereka sendiri saat berada di Kalimantan seperti Batak dengan HKBP, Suku Minahasa dan Ambon lebih suka ke GPIB bukan ke GKE (Marko Mahin & Rama Tulus 2005).

Tulisan ini ingin memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda mengenai latar belakang sejarah, dari peristiwa penggantian nama GDE menjadi GKE. Karena tidak ada yang bebas nilai, penggantian tersebut bukan hanya sekedar upaya semangat oikumene

dan Pancasila tetapi ada persaingan panjang antar etnis, kemudian ada pula dikotomi antara pihak penjajah dan terjajah dibalik pergumulan tersebut. Persaingan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda, mengenai pendidikan dan kesempatan berkarir dipemerintahan. Tentu saja kita tidak adil, kalau melihat peristiwa masa lalu, tanpa ada yang kita garis bawahi sebagai pemaknaan pada masa kini. Itu akan kita lihat pada bagian implikasi.

Metode

Penelitian sejarah digolongkan dalam “Metode Historis”, yaitu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah dengan melewati tahapan tertentu. Penerapan metode historis menempuh tahapan-tahapan kerja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Notosusanto (Sulasman 2014): Heuristis, menghimpun jejak-jejak masa lampau, dengan menggunakan studi pustaka dimana data-data didapatkan dari berbagai sumber cetak baik, dokumen, manuskrip dan buku-buku yang terkait dengan sejarah GKE. Kritik (sejarah), yaitu menyelidiki apakah jejak sejarah itu sejati baik bentuk maupun isinya. Bukan hanya mengumpulkan data sejarah tetapi juga mengkritisi keabsahan data yang ada, dalam hal ini sejarah yang berhubungan dengan GKE dan rivalitas antar suku. Interpretasi, yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta yang diperoleh sejarah itu, dalam hal ini interpretasi orang atas sebuah sejarah bisa dikatakan sah asalkan dijukan bukti. Historiografi atau Penyajian, yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah narasi, bahwa terjadi rivalitas antar suku Dayak dan Banjar dalam perubahan nama GKE.

Hasil dan Pembahasan

Rivalitas Antar Suku

Selama ini penulisan sejarah GKE, selalu mengaitkan dengan upaya GDE menjadi GKE hanya melihatnya dari sudut semangat oikumene, yang dibawa oleh para senior GKE seperti Pendeta Fridolin Ukur. Padahal ada sesuatu yang sangat penting, yaitu menghilangkan akar kolonial dibalik kata Dayak yang tersemat. Dimana dalam pergulatan kemerdekaan yang ada pada saat itu, kata GDE diidentikan dengan peran orang-orang Dayak yang dianggap mendukung pemerintah kolonial Belanda. Sejarah Panjang hubungan rivalitas orang-orang Dayak dengan kelompok suku Banjar, yang diwakili oleh kesultanan Banjar pada masa lalu, ternyata memiliki pengaruh kepada terhadap penggunaan nama GDE dikemudian hari. Kata Dayak dianggap sebagai representasi dari pendukung penjajah, sedangkan Banjar digambarkan sebagai bagian dari perjuangan nasional Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda, sebelum GDE dibentuk pada tahun 1927 BM mendirikan sekolah dasar bagi orang-orang Dayak, tetapi menolak untuk menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan di desa-desa. Kecuali bagi laki-laki yang ingin menjadi guru-guru sekolah dasar milik BM atau menjadi pendeta. BM juga menolak mengajarkan bahasa Belanda, yang dilandaskan atas kekhawatiran dari badan misi BM bahwa orang Dayak akan rusak moralnya apabila mengenal gaya hidup perkotaan dan politik kotor

pemerintah kolonial Belanda. Situasi ini membuat orang Dayak tidak bisa menjadi pegawai negeri, dibandingkan dengan murid Banjar di sekolah negeri milik pemerintah Belanda. Sehingga orang-orang Banjar, punya akses bekerja di birokrasi pemerintah Belanda.

Tidak sesuai harapan BM ternyata tidak bisa mengendalikan orang-orang Dayak sepenuhnya, orang-orang yang mereka didik justru membentuk kelompok elit Dayak dan kekuatan politik tersendiri. Jumat 18 Juli 1919 di Gedung Gereja di Kampung Hampatung, Kuala Kapuas, organisasi Dayak yang mereka namakan Pakat Dayak berdiri. Menjelang awal tahun 1923, Husman Baboe, Ketua Pakat Dayak, menerjemahkan nama Pakat Dayak dengan kata yang menyerupai Sarikat Islam yaitu Serikat Dayak. Dalam Surat Kabar berbahasa Belanda ditulis "*Bond op Dajakkers*", "*Dajak-Bond*" atau "*Dajaksche Bond*" (Gerry Van Klinkern 2004). Husman Baboe, berani menunjuk muka BM sebagai penyebab terbelakangnya orang Dayak. Tidak ingin dituduh seperti itu, BM membalas Husman Baboe dengan menuduhnya sebagai penyebar politik sosialis-komunis yang tidak beragama (*Berichten Uit Borneo*, 1927). Pada tahun 1926 Sarikat Dayak berganti nama menjadi Pakat Dayak. Salah satu tokoh kelompok itu adalah anak angkat dari Husman Baboe, yaitu Mahir Mahar. Pada tahun 1930 Mahir Mahar menghadap Gubernur Belanda untuk wilayah Kalimantan, yaitu B.J Haga dengan sebuah petisi yang menuntut agar pemerintahan Belanda lebih memperhatikan pembangunan di wilayah orang Dayak. Mahir Mahar salah satu dari elit Pakat Dayak, memberi argument kepada pamarintah Belanda bahwa wilayah Dayak adalah penyumbang sebagian besar ekspor karet di Kalimantan Selatan, kenapa hanya wilayah orang Banjar yang mendapat manfaat dari program pembangunan seperti jalan dan pendidikan.

Gereja Dayak Evangelis dan Elit Pakat Dayak

Pakat Dayak berusaha mengambil inisiatif dalam reformasi pendidikan di wilayah orang-orang Dayak sejak 1923. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dasar yang dinamakan *Hollandsche Dajak School* (HDS) dimana bahasa Belanda diajarkan untuk membekali kaum muda dengan kualifikasi untuk bisa melanjutkan ke sekolah menengah *Meer Uitgebroid Lager Onderwijs* (MULO) di Banjarmasin. Kebangkitan Dayak tidak dapat dibendung lagi, sampai akhirnya pihak BM sendiri pada tahun 1835 merestui dibentuknya Gereja Dayak Evangelis (GDE). Pada tahun yang sama, lima pendeta Dayak yang pertama ditahbiskan (Witschi 1942). Pentahbisan tersebut otomatis membentuk sebuah kepengurusan, dan kepengurusan itu kebanyakan anggotanya adalah Pakat Dayak. Walau tidak sejalan dengan ide mengenai Pakat Dayak, tetapi BM tidak dapat melarang saat para elit Pakat Dayak, atas dasar ikatan kekeluargaan masuk ke dalam kepengurusan GDE.

Pada tahun 1936 delegasi yang terdiri dari pengurus Pakat Dayak dan anggota Sinode GDE, pergi ke Batavia dan mengajukan permintaan tertulis kepada Gubernur Jenderal Hindia. Agar orang Dayak diberikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (*Volksraad*), karena selama itu hanya memiliki perwakilan Banjar (*Bandjarraad*) dari wilayah Kalimantan Selatan yang duduk di parlemen (Miles 1976). Pemerintah kolonial

tidak memberikan tanggapan positif terhadap gerakan Dayak, tetapi tidak sepenuhnya mengabaikannya. Pemerintah Hindia Belanda cenderung memasukkan Dayak dan Banjar ke dalam satu unit administratif yang sama, hal yang tidak disukai oleh para elite Dayak karena akan membuat Dayak menjadi lemah di bawah dominasi politik Banjar.

Pada tahun 1936 Gubernur Kalimantan, B. J Haga, mengesahkan Peraturan Pertanian yang bertujuan melarang orang Banjar menggunakan tanah pertanian orang Dayak. Tiga tahun kemudian ia mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, agar para hakim di Kalimantan untuk lebih memperhatikan pentingnya hukum adat di wilayah Dayak. B. J Haga menganjurkan pembentukan unit administrasi terpisah di Kalimantan Selatan yang terdiri dari daerah-daerah, di mana orang Dayak tinggal dan mendirikan Dewan Daerah Dayak (*Dajakraad*). Tahun 1941 *Commissie tot bestudeering van staatschtelijke hervor-mingen* sebuah komisi yang diketuai oleh Dr. H. Visman dari parlemen Hindia Belanda mengunjungi Banjarmasin, dalam rangka survei tentang apa yang diinginkan penduduk Hindia Belanda mengenai reformasi pemerintahan dan konstitusional. Sebuah provinsi yang otonom akan berdiri, dimana orang-orang Dayak yang memimpin.

Namun semua itu berubah saat kedatangan Jepang pada tahun 1942, untuk sementara keinginan membentuk provinsi otonom menjadi terabaikan. Jepang menangkap Gubernur B.J Haga, Pendiri Pakat Dayak Husman Baboe, pimpinan BM dr. Vischer kemudian di eksekusi mati (Ooi Keat Gin 2011). Sedangkan Mahir Mahar 1944 diangkat Jepang menjadi *Fuku Guntjo* (setingkat camat) bertugas di Puruk Cahu, Barito Hulu, wilayah Dayak Besar. Mahir Mahar tetap menawarkan agenda provinsi Dayak kepada pemerintah Jepang tapi tidak dihiraukan.

Ada Gereja Dayak Dibalik Dewan Dayak Besar

Pada tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu, disebut dengan era *Nederlandsch-Indische Civiele Administratie* (NICA). Nica membuat Perjanjian Linggardjati, ditandatangani oleh pihak Republik Indonesia dan Belanda (Rushdy Hoessein 2010). Pada tanggal 27 Desember 1947, di Banjarmasin terbentuk Dewan Dayak Besar, suatu Badan Pemerintahan Daerah yang meliputi wilayah administratif (*afdeling*) Kapuas dan Barito. Penamaan Dayak Besar (*Groot Dajak*) *Staatsblad* 1946 No. 17. Menurut Keputusan Gubernur tanggal 7 Desember 1946 No. 10, tercatat dalam *Statsblaad* 1948 No. 134, Daerah Dayak Besar (*Groot Dajak*) adalah *neo-zelf-bestuur* (daerah berpemerintahan sendiri yang baru), satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri (otonom) sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), dipimpin oleh J. van Dijk, dengan ibu kota sementara berkedudukan di Banjarmasin. Diangkatnya Mahir Mahar menjadi sekretaris Dewan Dayak Besar (DDB) sejak 26 Maret 1947, memunculkan anggapan bahwa ada GDE dibalik DDB selama ini. Pada Mei 1947 Pakat Dayak dibawah Mahir Mahar Kembali mendatangi Batavia menggandeng GDE sebagai simbol kekuatan Agama Kristen dan Etnis, dalam rangka meminta kepastian agar DDB diakui pemerintah Belanda.

Nasib berkata lain Konfrensi Meja Bundar 1949, menyingkirkan DDB dari gelanggang kekuasaan. Banjarmasin ditetapkan sebagai provinsi Kalimantan dan orang-orang Dayak tidak mendapat panggung dalam pentas politik Republik Indonesia (Mujiburrahman 2008). Kata "Dayak" akhirnya menjadi peyoratif sebagai penghianat Republik Indonesia karena lebih banyak bernegosiasi dengan Belanda. Walaupun sebenarnya Mahir Mahar dan Pakat Dayak tidak pernah mau dibawah kendali Belanda.

Perubahan Nama "Dayak" menjadi "Kalimantan"

Kita akan melihat proses perubahan GDE menjadi GKE, tahapan demi tahapan perebuahan tersebut sebagai berikut: Pada pasal 1 dalam Peraturan GDE tahun 1935 berbunyi, "Seraya memandang Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, segala sidang Jemaat kepunyaan Zending Basel di Borneo Selatan-Timur mempersatukan dirinya dalam satu Gereja yang disebut: "Gereja Dayak Evangelis" (*Evangelische Dayaksche Kerk*). Pada Sinode Umum yang Keempat di Banjarmasin tanggal 17-23 Februari 1946, pasal tersebut menjadi sebuah perdebatan, terutama mengenai Nama Gereja. Dimana Nama "Gereja Dayak Evangelis" dianggap hanya *representative* dari suku Dayak, maka disarankan untuk membuka pintu yang lebih luas kepada etnis yang diluar Dayak (Ukur 2000).

Apa yang telah dibahas dalam Sinode Umum tahun 1946, mengenai nama Gereja Dayak Evangelis, akhirnya menjadi pertimbangan, sampai pada Sinode Umum tahun 1950. Dalam Sinode inilah baru usul-usul perubahan dahulu itu dapat diterima dengan penuh kesadaran, sehingga menjadi "Gereja Kalimantan Evangelis". Pdt. H. Dingang, sebagai ketua majelis sinode ketika itu, mengungkapkan pandangannya:

"Kiranya perubahan nama itu tepat mengenai Kalimantan, sehingga yang dahulu telah dikemukakan beberapa orang, soal bahwa dengan nama Gereja Dayak Evangelis, maka Gereja itu hanya bagi suku Dayak saja, tidak menjadi suatu sebab akan membeda-bedakan umat Kristen yang berada di Kalimantan ini. Sinode 5-9 Nopember 1950 seolah-olah membuka pintu bagi segenap umat Kristen di Kalimantan, supaya dalam daerah ini terwujud satu daerah yang mempunyai Majelis Kristen yang melingkungkupi Kalimantan ini, yaitu Majelis Daerah Kalimantan yang mempunyai Dewan Daerah dan menjadi cabang Dewan Gereja-gereja di Indonesia DGI" (Ukur 2000).

Dilain pihak mengenai keabsahan penggunaan nama GKE, apabila dilihat dari sejarahnya dimana pihak sinode GKE yaitu Ethelbert Saloh dan Lukius Nahan membuat surat No.487/MS/54 tgl. 4 Oktober 1954 mengenai usulan perubahan nama GDE menjadi GKE kepada menteri kehakiman. Sedangkan dari menteri kehakiman sendiri, berdasarkan surat No. J.A.5/105/9 tgl. 17 November 1954 tidak pernah diputuskan secara resmi perubahan nama GDE menjadi GKE. Sayangnya dengan berdasarkan surat tersebut pihak majelis Sinode meyakini bahwa GKE sudah dapat digunakan sebagai nama gereja, padahal surat tersebut sama sakali bukan surat keputusan karena tanpa tanda tangan dan stempel instansi (Asmin 2004). Dalam artian perubahan nama GKE itu bisa dikatakan belum tuntas secara hukum. Baru dengan keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU2. AH01.04-240 tgl.22-08-2016 GKE secara sah diakui.

Kemudian apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, penggantian kata Dayak menjadi Kalimantan ini bukan hanya sekedar masalah keterbukaan terhadap etnis lain diluar Dayak. Tetapi juga ingin menegaskan bahwa GKE, bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana kata Dayak yang selama ini diasumsikan dan dihubungkan dengan kelompok yang berseberangan dengan Banjar, yang dianggap gambaran perjuangan Republik ditambah lagi keberadaan kantor majelis Sinode GKE berada di kota Banjarmasin. Dengan kata lain GKE ingin melepaskan beban masa lalu, walaupun perjuangan GKE bersama para tokoh Pakat Dayak, kemudian dilakukan dengan cara berbeda yaitu mendukung lahirnya provinsi Kalimantan Tengah yang lahir 1957.

Implikasi

Manusia adalah subjek sejarah yang tergantung pada tantangan ruang dan waktu. Dimana objek cerita sejarah karena sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi dimana sejarah itu hadir. Oleh karena itu, waktu atau periode selalu dapat digambarkan sebagai ruang sejarah di mana kedua kutub tersebut bermain atau dimainkan. Ini disebut "dunia sejarah" ketika mengandung tiga unsur keseluruhan: ruang, waktu, dan orang-orang yang memainkan atau memainkannya (Sahidin. 1999). Bagian itu melengkapi pemahaman tentang filsafat sejarah, peran manusia dalam sejarah, makna sejarah, dan pokok-pokok pemikiran sejarah. Dalam konteks tulisan ini, sangat penting adalah periode sejarahnya dimana perubahan GDE menjadi GKE sangat dipengaruhi oleh rivalitas antar suku yang saat itu terjadi.

Dalam perjalanan sejarah ditemukan bahwa Pakat Dayak menggandeng GDE untuk memperjuangkan aspirasi bersama, yaitu Dayak. Tetapi cara itu nampaknya tidak memberi pengaruh apa-apa bagi pemerintah kolonial Belanda. Hal ini merupakan fakta yang membantah "asumsi umum" bahwa apabila seagama dengan Belanda maka mendapat perlakuan istimewa. Dalam kasus ini, hal tersebut tidak berlaku. Mereka sangat sadar bahwa masyarakat Dayak tidak mendapat perhatian dan perlakuan yang layak dari pemerintah Belanda yang umumnya diasosiasikan dengan Kristen. Ini menyiratkan bahwa isu agama dan politik juga tidak selamanya bisa dimainkan.

Penghilangan nama Dayak dari adalah sebuah upaya gereja mencuci diri dari beban sejarah masa lalu yang mengidentikan Dayak dan kekuatan Kolonial, dimana dalam Sinode Umum GKE pada bulan Oktober 1962 menyampaikan pandangan bahwa "GKE yakin percaya bahwa Allah memberkahi dan mempunyai maksud tersembunyi terhadap revolusi Indonesia dan oleh karenanya Revolusi Indonesia ini dibawah pertimbangan kasih Allah" (Felth, Herbert & Castle 1988). Dalam artian bahwa GKE ingin menegaskan pandangannya yang mendukung pemerintah Republik Indonesia, dibawah politik Revolusi Terpimpinnya Soekarno. Pertimbangan perubahan nama GDE menjadi GKE juga tidak lantas menyingkirkan elit Pakat Dayak dari dalam gereja. bahkan pada tahun 1964-1974 mantan petinggi Pakat Dayak dan pejuang DDB yaitu Mahir Mahar masuk dalam kepengurusan sinode GKE sekaligus juga salah satu donatur GKE.

Dalam rivalitas ini, penulis mengambil sebuah pelajaran antara lain. Satu, bahwa rivalitas antara suku adalah sesuatu yang nyata, dan pemerintah yang tidak peka dalam

menanggapi akan menjadi bencana, berupa konflik *horizontal*. Dua, Adapun perbedaan suku dan agama adalah sebuah keniscayaan, namun apabila suara minoritas tidak didengar, maka jalan agar mereka didengar adalah jalan kekerasan. Tiga, rasa keadilan yang dituntut oleh suku Dayak, dalam hal ini mengenai pendidikan dan pembangunan yang merata sebaiknya diakomodir. Keempat, jangan ada dikotomi penjajah dan terjajah lagi, setelah kemerdekaan. Biarlah keduanya bersama mengisi kemerdekaan, dengan hidup berdampingan.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Dalam studi ini tentu saja bukan final, dalam artian bahwa banyak hal yang bisa dilihat. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan, bagaimana melihat dari sudut pandang yang berbeda dari perubahan nama GDE menjadi GKE sehingga menemukan hal-hal yang unik untuk menjadi bahan penelitian. Terutama studi histografi yang masih sangat sedikit sekali.

Kesimpulan

Gereja adalah sebuah komunitas orang percaya yang hidup dalam ruang dan waktu yang menyejarah, sehingga perubahan nama yang ada bukanlah hanya sekedar sebuah peristiwa yang tanpa makna. Ada peristiwa besar dan panjang mengapa perubahan nama GDE tersebut. Tulisan ini tidak menaifkan bahwa ada semangat oikumene yang diusung oleh gereja atas perubahan nama tersebut. Tetapi dilain pihak ada sesuatu yang besar yang mendesak nama Dayak tersebut harus diganti, kekawatiran akan cap bahwa GDE merupakan bagian dari penjajah bisa membuat gereja dalam masalah, mengingat bahwa GDE pernah dalam lingkaran sejarah panjang berjuang bersama Pakat Dayak untuk komunitas etnis Dayak dan bernegosiasi dengan kolonial.

Persaingan atau rivalitas antara suku Dayak dan Banjar sejarah abad ke 19 sampai berebut kursi di parlement Belanda dan juga tuntutan provinsi sendiri yang menolak dibawah kendali Banjar oleh kelompok elit Dayak yang secara getol mendatangi pemerintah Belanda di Batavia. Kelompok elit Dayak juga menggunakan kekuatan Gereja yaitu GDE sebagai sarana perjuangan berharap politik etnis dan agama bisa menjadi kekuatan politik yang berpengaruh, sayangnya perjuangan tersebut tidak semulus yang diharapkan. Penggantian nama menjadi GKE juga tidak pernah menyurutkan perjuangan orang-orang Dayak dalam gerakan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah yang berbuah manis pada tahun 1957. GKE juga secara terbuka mengasosiasikan diri sebagai gereja Nasionalis yang mendukung Pancasila dan kebijakan nasional dari pemerintah Indonesia.

Tulisan ini melihat bahwa gereja juga terlibat secara nyata dengan isu yang ada pada saat itu, kemudian gereja juga mencoba bertransformasi agar cita-cita perjuangan gereja bukan lagi hanya sekedar kepentingan kesukuan tetapi juga menjadi gereja yang nasionalis seperti yang Ukur sampaikan dalam tulisannya : kesadaran Gereja sebagai bagian yang hidup dalam persekutuan "*Catholica Ecclesia*" (Gereja yang am), dan

bergerak menuju keesaan Gereja di seluruh wilayah Indonesia, dengan memusatkan usaha-usahanya bagi penyatuan gereja yang ada di Kalimantan (Ukur 2000).

Rujukan

- Asmin, Werhan. 2004. "Werhan Asmin, Sejarah Pembentukan Gereja Dayak Evangelis (GDE) Dan Perubahan Namanya Menjadi Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) (Suatu Telaah Hukum)." Banjarmasin.
- Barnstein. 1837. "Wuppertal Archiv-Museum, Registar No.2.735, Wuppertal: Rheinische Missionsgesellschaft. Wuppertal. 1-8.
- Berichten Uit Borneo*, 1927. Hoenderloo: Drukkerij Doorgangshuis. 5.
- Felth, Herbert & Castle, Lance. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. 2nd ed. Jakarta: Jakarta: LP3ES.121.
- Frenedi. 2000. "Menggali Makna Perubahan GDE Menjadi GKE." Banjarmasin: STT GKE Banjarmasin. 27-29.
- Gerry Van Klinkern. 2004. "Dayak Ethnogenesis and Conservative Politics in Indonesia, Outer." In *Indonesia in Transition*, edited by Samuel & Henk nordholt Hanneman, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 115.
- Kriele, Edward. 1915. *Das Evangelium Bei Den Dajak Auf Borneo*. Barmen: Barmen: Verlag des Missionshauses. 73-74.
- Marko Mahin & Rama Tulus. 2005. *70 Tahun Gereja Kalimantan Evangelis: Pergumulan Dan Upaya GKE Menuju Kemandirian*. Banjarmasin: BPH MS GKE.
- Miles, Douglas. 1976. *Cutlass & Crescent Moon: A Case Study of Social and Political Change in Outer Indonesia*. Sydney 1976: Centre for Asian Studies, University of Sydney 1976. 109-110.
- Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.372-373.
- Ooi Keat Gin. 2011. "The Japanese Occupation of Borneo, 1941-1945." In *The Japanese Occupation of Borneo, 1941-1945*, edited by Ooi Keat Gin, New York: Routledge. 102-104.
- Rushdy Hoesein. 2010. *Terobosan Sukarno Dalam Perundingan Linggarjati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 267.
- Sahidin., Ajid Thohir & Ahmad. 1999. *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, Dan Kritis*. Jakarta: Jakarta: Kencana. 2.
- Sulasman. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*. Bandung: Bandung: Pustaka Setia. 90-147.
- Ukur, Fridolin. 2000. *Tuaiannya Sungguh Banyak: Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835*. 2nd ed. Jakarta: Jakarta: BPK Gunung Mulia. 71-71.
- Witschi, Hermann. 1942. *Christus Siegt: Geschichte Der Dajak-Mission Auf Borneo*. Basel: Basel: Missionsbuchhandlung. 190.